BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Anggun Rangga, 2011).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No.32 Tahun 2004 BAB III Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Terdapat 16 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk kabupaten/kota, namun ada urusan pemerintah yang olehUndang-undang di tentukan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.

Untuk mendukung terselenggaranya Otonomi Daerah yang optimal maka diberlakukanlah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini diatur dalam UU No 33 Tahun 2004. Desentralisasi *fiscal* yang di atur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari tiga macam, yaitu Pajak Daerah (*Tax Assignment*), Dana Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus. Dengan desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemandirian ini dapat di capai dengan mengoptimalkan PAD (PendapatanAsli Daerah) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah, seperti di atur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6.

Dalam prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, untuk itu pemerintah pusat memberikan dana perimbangan. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 3 dijelaskan dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi.

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Santosa dan Rahayu (2005) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, PDRB dan jumlah penduduk. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah mengaharuskan pemerintah mengoptimalkan fakto-faktor yang dapat mempengaruhi Pendaptan Asli Daerah (PAD) guna memperoleh PAD yang semakin tinggi. Di Indonesia Pendapatan Asli Daerah provinsi Sumatera Barat berada pada pisisi 16 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia,PAD tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta dan terendah adalah Sulawesi Barat. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya PAD suatu daerah, diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode (Sasana dalam Saputra, 2011). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor produksi daerah tersebut (Sasana dalam Saputra, 2011). PDRB Sumatera Barat berada pada posisi 19 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia,PDRB tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta dan terendah adalah Nusa

Tenggara Timur. PDRB Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya yang disebabkan oleh meningkatnya kemampuan diberbagai sektor-sektor ekonomi seperti meningkatnya kapasitas sektor pertanian, industri dan lainnya, total jumlah PDRB terbesar Provinsi Sumatera Barat ialah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.140.529.151 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,41% dan jumlah PDRB terkecil pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.30.949.945.

Datu.K (2012) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang semakin meningkat akan mencerminkan kondisi perekonomian daerah yang semakin baik.Ia juga menambahkan pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai pengaruh yang besar terhadap tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pertumbuhan ekonomi daerah secara tegas tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, baik yang produktif atau tidak produktif. (Sumber BPS dalam angka, 2000)

Jumlah Penduduk adalah salah satu indikator penting dalam suatu negara maupun daerah. Para ahli ekomoni klasik yang dipelopori Adam Smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai salah satu faktor untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Indonesia jumlah penduduk Sumatera Barat berada pada posisi 17 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk terbanyak yaitu provisi Jawa Barat dan terendah adalah Gorontalo dan Maluku Utara.

Karmer (dalam mankiw, 2006:207) meyakini bahwa jumlah penduduk akan mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah, yang menjelaskan apabila kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada daerah dengan banyak jumlah penduduk, sehingga ada lebih banyak temuan. Maka daerah dengan banyak jumlah penduduk akan meningkatkan pendapatan di dalam pemerintah daerah. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2006-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2006 jumlah penduduk sebesar 3.351.306 jiwa dan tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat sebesar 5.196.289 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,26%. Tingginya jumlah penduduk yang tidak diiringi penciptaan lapangan kerja akan meninggalkan angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan, peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan segaian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat. Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat, maka perlu diperhatikan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator kemandirian daerah.

Di lain hal, Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya juga akan berdampak pada pembangunan daerah, baik secara lansung maupun tidak lansung. Secara lansung jumlah penduduk akan berdampak pada segi kualitas dan kuantitas, yang mana nantinya akan mempengaruhi penerimaan tingkat retribusi dan pajak daerah yang merupakan salah satu komponen PAD. Dan secara tidak lansung akan mendorong munculnya berbabagai kegiatan ekonomi yang akam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Dari analisis diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat dan menuangkan hasilnya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul**"Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat".**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.
3. Bagi Universitas, dapat dijadikan sumbangan keilmuan dan menambah daftar kepustakaan.
4. Bagi masyarakat, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik terkait, dapat dijadikan sebagai rujukan serta tambahan informasi.
5. Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan reverensi dan bahan pertimbangan untuk dapat lebih mngoptimalkan PAD Sumatera Barat kedepannya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu waktu penelitian

(*times series*) yang digunakan dimulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015dan daerah penelitian adalah Provinsi Sumatera Barat. Variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah yang dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penerimaan PAD di Provinsi Sumatera Barat. Variabel bebas yang digunakan adalah variabelPDRBdan variabel jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, Bab V Temuan Empiris dan Implikasi Kebijakan, Bab VI Penutup.

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, dari latar belakang yang diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka diperoleh tujuan, manfaat dari penelitian dan ruang lingkup penelitian. Pada akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan

teori dan penelitian terdahulu tersebut maka didapat kerangka pemikiran konseptual. Di akhir bab ini terdapat hipotesis penelitian.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel-variabel penelitian dan defenisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, selain itu dalam bab ini juga terdapat ruang lingkup penelitian, serta pada akhir bab ini dilakukan pengolahan data.

Bab IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan kondisi umum daerah penelitian dan kemudian dijelaskan padapengaruh PDRB danjumlah penduduk terhadappendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Bab V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisa data yang telah diteliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa di ambil dalam penelitian ini.

Bab VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.